



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

EFEKTIVITAS PASAL 34 A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP BEBAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B RENGAT

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S1) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum*



Oleh :

RAHMAT FADHILAH

NIM. 11727102158

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ **EFEKTIFITAS PASAL 34 A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP BEBAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B RENGAT**” yang ditulis oleh:

Nama : RAHMAT FADHILAH

NIM : 11727102158

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2021

Pembimbing Skripsi

BASIR, SHI, M. Hum
NIK. 130217026



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Terhadap Beban Negara Dalam Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat"* yang ditulis oleh :

Nama : **RAHMAT FADHILAH**
 NIM : 11727102158
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Agustus 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Drs. H. Zainal Arifin, M.A

.....

Sekretaris

Hellen Last Fitriani, SH., MH

.....

Penguji I

Dr. Hj. Hertina, M.Pd

.....

Penguji II

Lovelly Dwina Dahen, SH.,MH

.....



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 10741006 200501 1 005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul " Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Terhadap Beban Negara Dalam Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat ". Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana syarat dan tata cara pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Bagaimana efektivitas pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana *extra ordinary crime* terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga binaan pemasyarakatan di rumah tahanan negara kelas II B Rengat..

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana syarat dan tata cara pemberian remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan *extra ordinary crime* di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana *extra ordinary crime* terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

Jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Syarat dan tata cara pemberian remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan *extra ordinary crime* di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bahwa narapidana *extra ordinary crime* yang ingin melakukan pengurusan remisi maka harus memiliki (JC) *Justice Collaborator* dari pihak penahanan (Kepolisian), apabila sudah maka Rumah Tahanan Negara akan melihat etika narapida tersebut, kemudian telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, dan berprilaku baik. Maka kemudian barulah Narapida tersebut bisa melakukan pengurusan remisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana *extra ordinary crime* terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat belum efektif, karena tahanan yang seharusnya bebas dari penjara 2 atau 3 tahun lalu tetapi karena adanya Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tahanan dibebaskan dalam waktu yang lebih lama lagi sehingga hal ini akan membebankan Negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Terhadap Beban Negara Dalam Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk yang tercinta Ayahanda Marlis dan Ibunda Welnita dan Kakak tercinta Melisa, S.Si, Melia Siska, S.E, dan Abangda Aulia Rahman, A.md AK yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis. Keluarga besar penulis yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan doa serta dukungan sehingga penulis sampai pada titik keberhasilan ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab., M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU Beserta Jajarannya.
4. Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Basir, S.H.I., M.H. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Helmi Basri, Lc., M.A selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum (HTN) angkatan 2017, terkhusus Kelas Ilmu Hukum C, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikun Wr.Wb.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis,

RAHMAT FADHILLAH

NIM. 11727102158

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat	15
B. Visi Dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat	16
C. Sasaran Kinerja Pegawai.....	16
D. Nilai-nilai Aparatur Petugas Pemasyarakatan.....	17
E. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat	19
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Efektivitas Hukum.....	20
B. Lembaga Pemasyarakatan.....	26
C. Rumah Tanahan Negara.....	29
D. Narapidana	30
1. Pengertian Narapidana	30
2. Kewajiban Narapidana	32
3. Larangan Bagi Narapidana.....	33
E. Remisi	35

F. Mekanisme Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan.....	36
---	----

BAB IV PEMBAHASAN

A. Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan <i>Extra Ordinary Criem</i> Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012	42
B. Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Narapidana <i>Extra Ordinary Crime</i> Terhadap Beban Negara Dalam Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Gambar II.2 B Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.....	19
Tabel IV.1 Jawaban Narapidana <i>Extra Ordinary Crime</i> Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat Tentang Pemberian Remisi.....	60



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara, menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*).¹ Mengenai keberadaan manusia sebagai makhluk, dikatakan pula oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan lainnya, dan manusia. masyarakat, dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pergaulan hidup sehari-hari.²

Hukum merupakan pelembagaan aturan. Ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan setiap individu perlu dikontrol oleh hukum maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan oleh yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Ekonomi adalah sistem yang mengatur pemilikan hak untuk berpindah dari satu individu ke pada individu yang lain, dan budaya adalah nilai-nilai bersama dari suatu masyarakat yang berkembang sejalan dengan kesadaran masyarakat tentang hal yang baik, luhur, indah, dan sebagainya. Ketiga hal tersebut merupakan indikator kesuksesan dalam sebuah masyarakat

¹ Lysa Anggraini, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 1

² *Ibid.*, h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau sebuah Negara dalam menjaga kemakmuran masyarakat yang berdampak pada lingkungan sekitar dan lain-lain oleh perubahan sosial.³

Banyak kelompok-kelompok manusia dengan berbagai pola dan tingkah laku yang berbeda-beda. Namun demikian dari sekian ragam kelompok manusia yang mempunyai pola-pola kehidupan yang bervariasi tidak pernah terlepas dari problema yang merupakan akibat adanya kehidupan bersama dalam suatu masyarakat tertentu.

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang, cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan jadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya. Kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.⁴

Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum bersifat mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial. Selain mengatur, hukum juga mempunyai sifat memaksa karena hukum mempunyai kemampuan untuk memaksa masyarakat untuk patuh dengan jalan penerapan sanksi yang tegas untuk mereka yang melanggar, sehingga keberadaan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai perwujudan dari sifat memaksanya hukum.⁵

³ Zainudin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 71.

⁴ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, (Bandung: Citr Aditya Bakti, 1999), h. 51

⁵ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sanksi pidana yang berupa perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan (Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan) yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan.⁶

Pembinaan sebagian besar narapidana dibina didalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara, sebenarnya narapidana harus dipidana dan dibina hanya di Lembaga Pemasyarakatan saja, tidak di Rutan (Rumah Tahanan Negara). Karena Rutan hanya diperuntukkan bagi para tahanan. Tetapi karena tidak disetiap Kota Kabupaten mempunyai Lembaga Pemasyarakatan, maka sebagian narapidana terpaksa dipidana di Rutan, dititipkan di Rutan setempat. Terutama untuk narapidana dengan pidana dibawah satu tahun atau narapidana yang sisa pidananya tinggal beberapa bulan saja, dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan ke Rutan tempat asal narapidana, guna persiapan diri menjelang lepas/habis masa pidananya.⁷

Dalam pengertiannya yang lebih mendalam Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.”⁸ Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya pemberian remisi. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapapun

⁶ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), h.3

⁷ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan 1995), h. 78-79

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sepanjang narapidana tersebut menjalani pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati.

Berkaitan dengan kejahatan yang dalam hal ini memperoleh pengecualian yakni dengan memperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam dictum menimbang disebutkan bahwa memperketat syarat dan tata cara pemberian Remisi diberlakukan bagi pelaku tindak pidana, pada Pasal 34 A disebutkan bahwa narapidana yang diperketat syarat dan tata cara pemberian remisi, antara lain :

(1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, juga harus memenuhi persyaratan:

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
- 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiadaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Kemuidan Pasal 34B menjelaskan bahwa:

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.

(4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.⁹

Pada dasarnya narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan makanan yang layak, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 14 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Penyelenggaraan makanan yang dilakukan dengan sistem swakelola berkaitan dengan pihak dapur instalasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan semua kegiatan penyelenggaraan makanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.¹⁰ Penyelenggaraan makanan di Lapas dilakukan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan.

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi warga binaan pemasyarakatan

⁹Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

¹⁰Repa Kustipia, "Analisis Sistem Penyelenggaraan Makanan Dan Daya Terima Menu (PERSEPSI) yang Disajikan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya", Jurnal Ilmu Gizi Vol.8 No.2 2016, h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan tahanan. Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui perkiraan belanja makanan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan jumlah bahan makanan yang sesuai.¹¹ Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Dikutip dari Badan Pusat Statistik jumlah tahanan yang ada di tahanan Kepolisian, tahanan kejaksaan, tahanan Pengadilan, tahanan Pengadilan Tinggi Tahun 2020 adalah berjumlah 67. 468.00 orang.

Artinya negara membiayai penyelenggaraan makanan narapidana selama menjalani masa tahanan dengan mendapatkan makanan yang layak yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Adapun jumlah narapidana *extra ordinary crime* di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berjumlah 312 orang, narapidana yang mendapatkan remisi berjumlah 90 orang, sedangkan narapidana yang belum mendapatkan remisi berjumlah 222. Artinya sebanyak 222 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat masih membebankan negara dalam penyelenggaraan makannya.

Fenomena yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat bahwa jika dilihat dari tahanan yang tidak mendapatkan remisi pada kasus-kasus pidana *extra ordinary crime* ada tahanan yang seharusnya bebas dari penjara 2 atau 3 tahun lalu tetapi karena adanya Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam

¹¹Diasti Rizki Ramadhani,” *Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana*”, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol.7 No.1 2020, h. 146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pemberian Remisi tersebut tahanan dibebaskan dalam waktu yang lebih lama lagi sehingga hal ini akan membebaskan Negara dalam penyelenggaraan makanan bagi warga binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana konsep pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta bagaimana efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi terhadap Beban Negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat

Berdasarkan ketentuan tersebut penulis ingin melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Terhadap Beban Negara Dalam Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemaham serta penafsiran yang keliru serta memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu khusus tentang Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana syarat dan tata cara pemberian remisi bagi warga binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012?
2. Bagaimana efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana *extra ordinary crime* terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui syarat dan tata cara pemberian remisi bagi warga binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
 - b. Untuk mengetahui efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana *extra ordinary crime* terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.
2. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Strata Satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- b. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Hukum Tata Negara dan juga dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian masukan dan sumbangan pemikiran bagi Hukum Tata Negara.

E. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.¹² Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi di adakan penelitian ini adalah di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat Jalan Pekan Heran KM.4 Pematang Reba Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Riau Telp : 0769341056, E-mail : rutan.rengat@gmail.com, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat masih ada terdapat problematika efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi terhadap beban negara dalam

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52

penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.¹³ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relavan dengan kebutuhan Penelitian.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,¹⁴ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c) Data Tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus Hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹⁵

Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, dan Narapidana *Extra Ordinary Crime*.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 30

¹⁴ *Ibid*, h. 31

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.118

Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹⁶ Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah purposive sampling. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, dan 40 orang Narapidana Extra Ordinary Crime.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- 1) Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.
- 2) Wawancara, yaitu proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, Kasubsi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, dan 3 orang Narapidana *Extra Ordinary Crime*.
- 3) Angket, yaitu suatu daftar atau kumpulan pertanyaan tertulis yang dijawab secara tertulis untuk 40 orang Narapidana *Extra Ordinary Crime*.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan

¹⁶*Ibid*, h. 119

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab di uraikan dalam sub-bab, sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan SistematikanPenulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dalam bab ini akan di uraikan gambaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat, Stuktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat.

BAB III:TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini akan di uraikan konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian diantaranya, tentang Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Tugas Rumah Tahanan Negara, konsep narapidana, konsep remisi, penyelenggaraan makanan di rumah tahanan negara dan teori efektivitas hukum.

BAB IV:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian, meliputi bagaimana syarat dan tata cara pemberian remisi bagi warga binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan bagaimana efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana *extra ordinary crime* terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

BAB V :PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat pertama kali didirikan di kota Rengat dipusat ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 37 Rengat, bangunan yang ditempati pada saat itu adalah bangunan peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1911. Untuk memenuhi kebutuhannya, RUTAN Rengat terus berbenah diri, pada tahun 1984 mendapat kucuran dana untuk pembangunan kantor baru, dengan adanya dana pembangunan tersebut, RUTAN Rengat dipindahkan pembangunannya ke Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat yang berjarak lebih kurang 20 KM dari bangunan RUTAN lama. Pada tahun 1987 Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat selesai.¹⁷

Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat merupakan salah satu rumah tahanan yang terletak di Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan jarak tempuh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau ± 185 km. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di Kecamatan Rengat Barat Kelurahan Pematang Reba. Dahulunya pusat pemerintahan dan pusat ekonomi terpusat di Kota Rengat sehingga untuk pemerataan

¹⁷ Profil Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat

pembangunan wilayah dibangunlah pusat pemerintahan di Kecamatan Rengat Barat Kelurahan Pematang Reba.¹⁸

B. Visi dan Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat¹⁹

Visi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat :

“Memulihkan kesatuan hidup kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai individu, anggota masyarakat dan Makhluq Tuhan yang Maha Esa”.

Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat :

- a. Membangun RUTAN dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pelayanan prima agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi manusia yang produktif.
- b. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Petugas RUTAN.
- c. Melaksanakan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta pemajuan dan perlindungan HAM.
- d. Menciptakan suasana RUTAN yang tertib, indah dan bersih.

C. Sasaran Kinerja Pegawai

Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2018 di Rumah Tahanan Kelas II B Rengat menerangkan tugas Penjaga Tahanan sebagai berikut²⁰ :

- a. Melakukan pengawasan WBP di lingkungan blok.
- b. Melakukan pengawasan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran WBP.
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban.
- e. Melaksanakan pengeledahan kamar.
- f. Melaksanakan tugas dan melaporkan kepada komandan jaga sesuai pembagian tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan.

D. Etika Aparatur Petugas Pemasyarakatan

Guna mewujudkan visi dan misi, rencana strategis pembangunan Reformasi Birokrasi dan E-Gov. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat menganut, menanamkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai P-A-S-T-I-S-M-A-R-T yaitu²¹:

a. *Profesional*

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

b. *Akuntable*

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

c. *Sinergi*

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para

²¹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

d. *Transparan*

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

e. *Inovatif*

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;

f. *Serious*

Petugas Permasyarakatan harus senantiasa menerapkan selalu prinsip serius dalam bekerja;

g. *Minded*

Petugas Permayarakatan harus memiliki pemikiran yang luas dan berfikir yang kreatif agar menimbulkan dan menghubungkan pola pola baru dalam berkerja;

h. *Active*

Petugas Permayarakatan harus aktif dalam bertugas dan bersungguh- sungguh dan menanamkan prinsip kerja keras dalam berkerja;

i. *Responsive*

Petugas Permayarakatan harus peka dalam berbagi permasalahan

yang terjadi dan harus tanggap jika permasalahan yang akan muncul dalam bertugas dan bekerja;

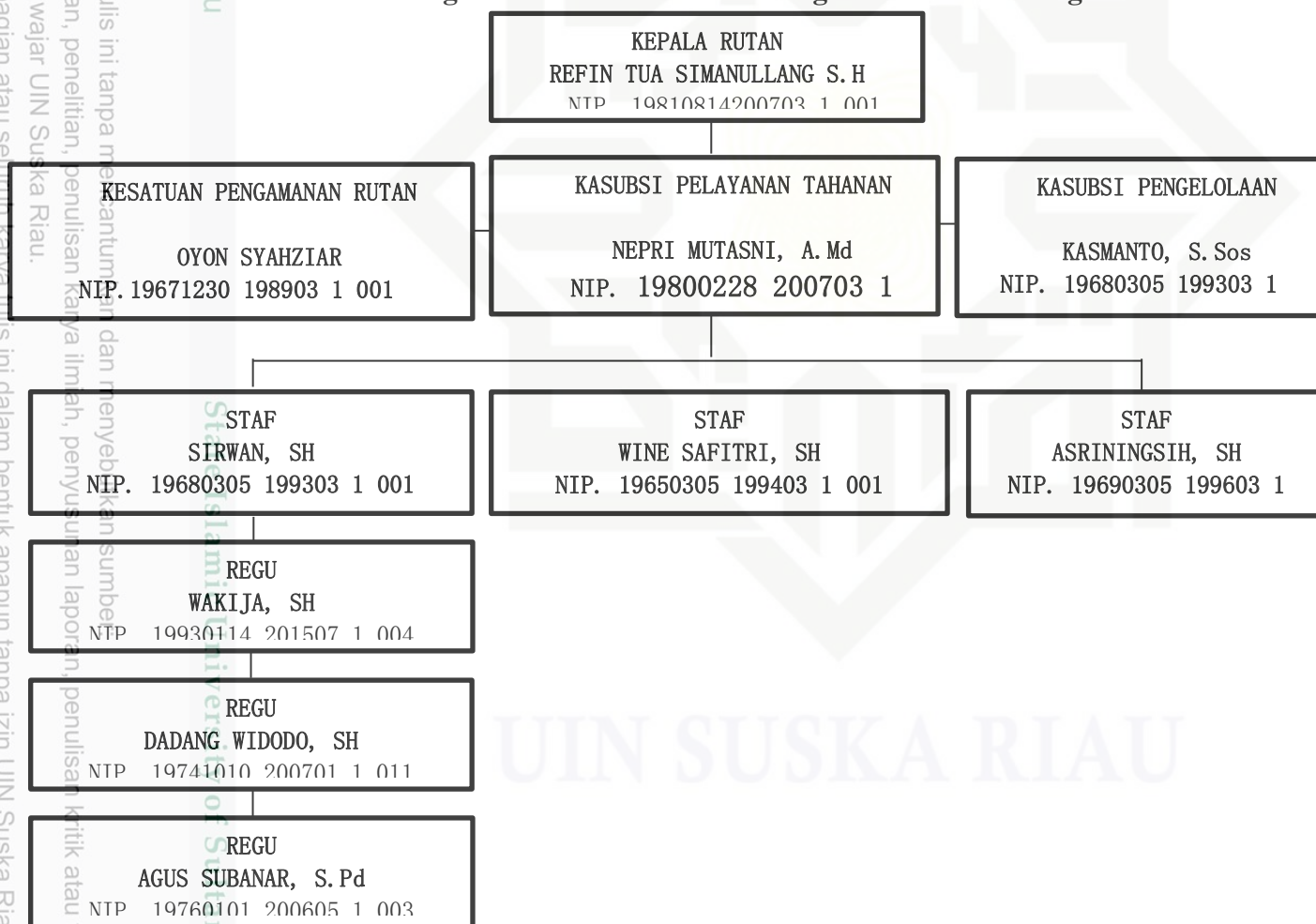
j. *Talk*

Petugas Permasalahannya harus bisa menjalin komunikasi yang baik dalam bertugas dan bekerja sehingga dapat menjalin hubungan kekeluargaan yang baik.

E. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat²²

Gambar II.2

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat



Sumber Data : Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat

²² *Ibid.*,



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Efektivitas Hukum

1. Pengertian

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.²³

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.²⁴ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu.

Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka. 2002) h. 284.

²⁴ *Ibid*

masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya. Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa kepentingan itu ada bermacam-macam, di antaranya yang bersifat *compliance*, *identification*, *internalization*²⁵.

2. Faktor-Faktor Yang Mengukur Ketaatan Terhadap Hukum

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain²⁶ :

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009) h. 375

²⁶ *Ibid.* h. 376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.²⁷

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnresyang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :²⁸

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

²⁷ *Ibid.* h. 376

²⁸ *Ibid.* h. 376

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :²⁹.

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.³⁰

3. Tolak Ukur Efektivitas Dalam Penegakan Hukum

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas

²⁹ *Ibid.* h. 378

³⁰ *Ibid.* h. 379.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :³¹

1. Faktor Hukum

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.³²

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini

³¹ Soerjono Soekant. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.) h. 5

³² *Ibid.* h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.³³

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.³⁴

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.³⁵

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga 27 dituruti) dan

³³ *Ibid.* h. 21

³⁴ *Ibid.* h. 37

³⁵ *Ibid.*,

apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.³⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.³⁷

B. Lembaga Pemasyarakatan

Dalam rangka pembaharuan sistem dan pelaksanaan pidana, maka istilah sistem kepenjaraan telah diubah menjadi sistem pemasyarakatan, dan istilah penjara diganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Demikian pula dalam hal perlakuan terhadap narapidana mengalami perubahan dari pembalasan menjadi pembinaan. Oleh karena pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik

³⁶ Iffa Rohmah. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 28 November 2020.

³⁷ *Ibid.* h. 53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dan bertanggung jawab, menyadari kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum.³⁸

Lembaga Pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kalapas.³⁹

Bertolak dari pandangan Dr. Saharjo, SH., tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan dari pidana penjara. Konsep pemasyarakatan tersebut disempurnakan oleh Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kepenjaaran pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan diatas sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.⁴⁰

Dalam hal ini Howard Jones menerangkan, bahwa sejak jaman raja mesir pada tahun 2000 sebelum masehi dikenal pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kalanya sebagai penahanan untuk keperluan lain menurut Hukum Romawi dari jaman Justianus abad ke- 5 sebelum Masehi. Disekitar abad ke-16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti

³⁸Rahmat Abdullah. *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9 No. 1. Januari-Maret 2015. h. 50

³⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

⁴⁰Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. (Refika Aditama. Bandung. 2013). Cet. Ke-3 h. 98

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

tindakan untuk melatih bekerja di Bridewell yang terkenal dengan nama *Thrifless poor* bertempat dibekas istana Raja Edward VI tahun 1522. Kemudian setelah dikeluarkannya *Act of 1630* dan *Act of 170* dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya dibina *The House of Correction*.⁴¹

Menurut P.A.F. Lamintang mengemukakan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴²

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasrkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaandalam tata peradilan pidana.⁴³ Konsepsi pemasyarakatan bukan semata merumuskan tujuan dari pidana penjar, malainkan suatu sistem pembinaan, metode dalam bidang “*Treatment of offenders*”. Soedjono menjelaskan sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana berdasarkan azas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat.⁴⁴

⁴¹ *Ibid.* h. 87

⁴² P. A. F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. (Sinar Grafika. Jakarta. 2012). Cet. Ke-2 h. 69

⁴³ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁴⁴ Arifin, *Model Implementasi Pendidikan Kesadaran Hukum Bagi Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*. (SPS UPI. Bandung. 2006). h. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik.⁴⁵ Untuk melaksanakan tugas, Lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:⁴⁶

- a. Melakukan pembinaan narapidana/ anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/ kerohanian narapidana/ anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Rumah Tahanan Negara

Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mulai ada sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dimana terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 jenis penahanan dapat berupa⁴⁷:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara
2. Penahanan Rumah

Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam Bab III Pasal 18 sampai 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara. Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN

⁴⁵ Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman RI, Rumah Tahanan Negara adalah pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan tahanan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, RUTAN mempunya fungsi⁴⁸:

1. Melakukan pelayanan tahanan;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan;
3. Melakukan pengelolaan Rutan;
4. Melakukan urusan tata usaha.

D. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁴⁹ sedangkan menurut kamus induk

⁴⁸ Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman RI

⁴⁹ <https://kbbi.web.id>. Narapidana Diakses pada 18 Mei 2021 Pukul 23:12 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.⁵⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan menurut artikel yang dibuat oleh Hukum Online.Com menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Sedangkan pengertian terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵¹

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement*

⁵⁰Dahlan. M.Y. Al-Barry. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. (Target Press. Surabaya. 2003). h. 53

⁵¹www.hukumonline.com diakses Pada 18 Mei 2021 Pukul 23:00 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

(Reglemen Penjara) Stbl. 1917 Nomor. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevangen Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

2. Kewajiban Narapidana

Seorang narapidana yang sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu tindak pidana mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari narapidana ini tercantum pada Pasal 23 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yakni:⁵²

- a. Mengikuti program pembinaan yang meliputi kegiatan perawatan jasmani dan rohani, serta kegiatan tertentu lainnya dengan tertib.
- b. Mengikuti bimbingan dan pendidikan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- c. Mengikuti kegiatan latihan kerja yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) jam dalam sehari.

⁵² B Mardjono Reksodiputro. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta 2009). h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mematuhi peraturan tata tertib lapas selama mengikuti program kegiatan.
- e. Memelihara sopan santun, bersikap hormat dan berlaku jujur dalam segala perilakunya, baik terhadap sesama penghuni dan lebih khusus terhadap seluruh petugas.
- f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam hubungan interaksi sesama penghuni.
- g. Melaporkan kepada petugas segala permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana, lebih khusus terhadap masalah yang dapat memicu terjadinya gangguan kamtib.
- h. Menghindari segala bentuk permusuhan, pertikaian, perkelahian, pencurian, dan pembentukan kelompok-kelompok solidaritas di antara penghuni di dalam lapas.
- i. Menjaga dan memelihara segala barang inventaris yang diterima dan seluruh sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan narapidana.
- j. Menjaga kebersihan badan dan lingkungan dalam lapas.

3. Larangan Bagi Narapidana

Dalam meaksanakan pemasyarakatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tentu ada larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana, diantaranya adalah:⁵³

- a. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;

⁵³ Pasal 4 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
- c. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
- d. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemsayarakatan yang berwenang;
- e. Melawan atau menghalangi Petugas Pemsayarakatan dalam menjalankan tugas;
- f. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
- g. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
- h. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- i. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
- j. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
- k. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- l. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- m. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

- n. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, atau tamu/pengunjung;
- o. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
- p. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
- q. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasyarakatan;
- r. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, pengunjung, atau tamu;
- s. Melakukan kerusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
- t. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- u. Menyebarkan ajaran sesat; dan
- v. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

E. Remisi

Remisi dalam sistem pelaksanaan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para Narapidana, untuk itu di dalam sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila Narapidana tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berkelakuan baik maka tidak dapat diberikan remisi.⁵⁴

Remisi dalam Sistem Pemasyarakatan diartikan sebagai potongan hukuman bagi narapidana setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan. Pengertian remisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengampunan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum. Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang di berikan setiap tanggal 17 Agustus.⁵⁵

Pengertian Remisi Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan; “Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat- syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.”⁵⁶

F. Mekanisme Penyelenggaraan Makanan Di Lembaga Pemasyarakatan/Rutan

Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain, juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh

⁵⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), h.133

⁵⁵ *Ibid*, h. 136.

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

terhadap berbagai penyakit.⁵⁷

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan dimanapun ia berada serta memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Tanpa adanya makanan dan minuman, manusia tidak dapat melangsungkan hidupnya. Adapun pengertian makanan menurut WHO (*World Health Organization*) yaitu semua substansi yang diperlukan tubuh, kecuali air dan obat-obatan dan substansi-substansi yang dipergunakan untuk pengobatan.⁵⁸

Makanan yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, diantaranya :

1. Berada dalam derajat kematangan yang dikehendaki
2. Bebas dari pencemaran di setiap tahap produksi dan penanganan selanjutnya.
3. Bebas dari perubahan fisik, kimia yang tidak dikehendaki, sebagai akibat dari pengaruh enzim, aktifitas mikroba, hewan pengerat, serangga, parasit dan kerusakan-kerusakan karena tekanan, pemasakan dan pengeringan.
4. Bebas dari mikroorganisme dan parasit yang menimbulkan penyakit yang dihantarkan oleh makanan (*food borne illness*).⁵⁹

Penyelenggaraan makanan di Lapas dan Rutan dilaksanakan dimulai dari proses perencanaan anggaran, perencanaan menu, perhitungan kebutuhan bahan makanan, pemesanan dan pembelian bahan makanan, penerimaan, penyimpanan, persiapan pengolahan bahan makanan, pendistribusian makanan, monitoring,

⁵⁷ Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), h.

64

⁵⁸ <http://www.putraprabu.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

⁵⁹ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

evaluasi, pencatatan dan pelaporan.⁶⁰

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran adalah suatu kegiatan penyusunan biaya yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah tersedianya taksiran belanja makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan, macam dan jumlah bahan makanan WBP dan tahanan sesuai standar. Perencanaan anggaran dimulai usulan Lapas/Rutan melalui Kanwil Dephuk dan HAM, dan selanjutnya diputuskan oleh Sekretariat Jenderal Dephuk dan HAM.⁶¹

2. Perencanaan Menu

Perencanaan menu adalah suatu kegiatan penyusunan menu dengan gizi seimbang yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi WBP dan tahanan. Tujuan perencanaan menu adalah tersedianya siklus menu sesuai klasifikasi pelayanan yang ada di Lapas/Rutan dalam kurun waktu tertentu. Pada penyusunan menu dipertimbangkan faktor yang mempengaruhi antara lain standar porsi dan peraturan pemberian makanan. Penyusunan menu dilakukan oleh Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebiasaan makan dan ketersediaan bahan makanan di daerah.⁶²

3. Pehitungan Kebutuhan Bahan Makanan

Perhitungan kebutuhan bahan makanan adalah proses penyusunan kebutuhan bahan makanan yang diperlukan untuk pengadaan bahan makanan

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sesuai menu yang ditetapkan dan jumlah WBP dan tahanan, dengan tujuan untuk tercapainya usulan dan kebutuhan bahan makanan untuk WBP dan tahanan selama satu tahun.⁶³

4. Pengadaan Bahan Makanan

Proses pengadaan bahan makanan bagi WBP dan tahanan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang dan jasa.

5. Pemesanan, Penerimaan dan Penyimpanan Bahan Makanan

Pemesanan adalah penyusunan permintaan bahan makanan berdasarkan menu sesuai jumlah WBP dan tahanan. Tujuan pemesanan adalah tersedianya pesanan sesuai standar atau spesifikasi yang ditetapkan.

Pemeriksaan bahan makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.

Penyimpanan bahan makanan adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporan.

6. Persiapan, Pengolahan Bahan Makanan dan Pendistribusian

Makanan Persiapan bahan makanan adalah rangkaian kegiatan dalam penanganan bahan makanan meliputi berbagai proses antara lain, membersihkan, memotong, mengupas, menggiling, mencuci dan merendam

⁶³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan makanan yang diolah. Pengolahan bahan makanan adalah suatu kegiatan memasak bahan makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi dengan cara menumis, menggoreng, mengukus, sesuai teknik memasak yang diperlukan. Tujuan pengolahan bahan makanan adalah untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa, keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh. Pendistribusian makanan adalah kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang dilayani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Tujuan pendistribusian makanan adalah agar WBP dan tahanan mendapat makanan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.⁶⁴

7. Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan adalah mencatat tiap langkah kegiatan dalam penyelenggaraan makanan sedangkan pelaporan adalah hasil pengolahan dari pencatatan yang dilakukan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan. Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan sebagai alat perekam dan pemantau dari seluruh rangkaian proses penyelenggaraan makanan. Pencatatan dan pelaporan antara lain mencakup penerimaan, pemakaian, stok/sisa yang belum terpakai, dan lain-lain yang dianggap perlu. Pencatatan dilakukan setiap hari, yang dilaporkan dilakukan secara berkala dan berjenjang.⁶⁵

8. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah kegiatan untuk mengikuti dan mengetahui

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

perkembangan setiap proses kegiatan secara terus-menerus baik langsung maupun tidak langsung. Evaluasi adalah kegiatan penilaian oleh Kalapas/Karutan terhadap penyelenggara makanan sejak perencanaan sampai pendistribusiannya secara rutin dan berkala.⁶⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁶ *Ibid.*,



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Syarat dan tata cara pemberian remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan *extra ordinary crime* di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bahwa narapidana *extra ordinary crime* yang ingin melakukan pengurusan remisi maka harus memiliki (JC) *Justice Collaborator* dari pihak penahanan (Kepolisian), apabila sudah maka Rumah Tahanan Negara (Rutan) akan melihat etika Narapida tersebut dengan mengikuti aturan yang berlaku, kemudian telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, dan berprilaku baik. Maka kemudian barulah Narapida tersebut bisa melakukan pengurusan remisi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 .
2. Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam pemberian remisi narapidana *extra ordinary crime* terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat belum efektif, melihat jumlah Narapidana *Extra Ordinary Crime* di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat berjumlah 312 orang, narapidana yang yang mendapatkan remisi berjumlah 90 orang, sedangkan narapidana yang belum mendapatkan remisi berjumlah 222. Artinya sebanyak 222 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat masih membebankan negara dalam penyelenggaraan

makannya. Padahal ada tahanan yang seharusnya bebas dari penjara 2 atau 3 tahun lalu tetapi karena adanya Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pemberian remisi tersebut tahanan dibebaskan dalam waktu yang lebih lama lagi sehingga hal ini akan membebankan Negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran yaitu :

1. Untuk Rumah Tahanan Negara sebagaimana yang telah di atur didalam Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disarankan agar kedepannya harus memberikan perlakuan yang sama dalam pemberian remisi bagi narapidana extra ordinary crime dengan narapida biasa lainnya.
2. Untuk narapidana sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Warga Binaan Pemasyarakatan disarankan agar dilakukan perubahan agar pemberian remisi bagi narapidana *extra ordinary crime* diperlakukan sama dengan narapidana lainnya maka hal ini tidak akan membuat narapida tersebut menjadi lama dalam menjalankan masa tahanan sedangkan sebenarnya narapidana tesebut sudah bisa mengajukan remisi dan tidak lagi membebankan negara dalam membiayai penyelenggaraan makan bagi Narapidana tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2006
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009) h. 375
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008
- Arifin, *Model Implementasi Pendidikan Kesadaran Hukum Bagi Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang*. SPS UPI. Bandung. 2006
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1986
- B Mardjono Reksodiputro. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan*. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta 2009)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan 1995
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2013
- Dahlan. M.Y. Al-Barry. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*. Target Press. Surabaya. 2003
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53
- Lysa Anggraini, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016
- Notoatmodjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003
- P. A. F. Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2012
- Panjaitan dan Simorangkir. *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1995

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung: Citr Aditya Bakti, 1999
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Soerjono Soekant. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 172
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Diasti Rizki Ramadhani, "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol.7 No.1 2020
- Repa Kustipia, "Analisis Sistem Penyelenggaraan Makanan Dan Daya Terima Menu (PERSEPSI) yang Disajikan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya", *Jurnal Ilmu Gizi* Vol.8 No.2 2016
- Diasti Rizki Ramadhani, "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol.7 No.1 2020
- Rahmat Abdullah. *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 9 No. 1. Januari-Maret 2015.
- Dikutip dari <https://riaukarya.com/read/detail/616/lifestyle/inhu/sejarah-terbentuknya-kabupaten-indragiri-hulu> diakses pada 11 Juni 2021, pukul 16.10
- <http://erepo.unud.ac.id>. *Jurnal Erepo Unud*. Tinjauan Umum tentang Hak Narapidana. (Universitas Udayana. 2016). h. 3. Diakses Pada 1 Juni 2021 Pukul 00:37. Wib.
- Iffa Rohmah. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 28 November 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak. <https://kbbi.web.id>. Diakses Pada 18 Mei 2021 Pukul 00:18 Wib.
- <https://kbbi.web.id>. Narapidana Diakses pada 18 Mei 2021 Pukul 23:12 Wib



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

www.hukumonline.com diakses Pada 18 Mei 2021 Pukul 23:00 Wib

<http://www.putraprabu.wordpress.com>, diakses pada tanggal 20 Mei 2021.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpananan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman RI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *"Efektivitas Pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Pemberian Remisi Terhadap Beban Negara Dalam Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Rengat"* yang ditulis oleh :

Nama : **RAHMAT FADHILAH**
 NIM : 11727102158
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Daring/ Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Drs. H. Zainal Arifin, M.A

Sekretaris
Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji I
Dr. Hj. Hertina, M.Pd

Penguji II
Lovelly Dwina Dahren, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor
Sifat
Lamp.
Hal

Un.04/F.I/PP.00.9/2919/2021

Pekanbaru, 12 Maret 2021

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

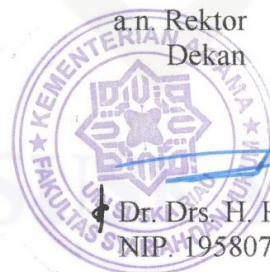
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RAHMAT FADHILAH
NIM : 11727102158
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Rutan Kelas IIB Rengat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : EFEKTIVITAS PASAL 34A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99
TAHUN 2012 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP BEBAN
NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RENGAT.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sila Dindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 108/DPMTSP/NON IZIN-SKP/IV/2021

MEMBACA

: Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 31 Maret 2021 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;

MENIMBANG

: Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39858 tanggal 19 Maret 2021

MENGINGAT

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama : **RAHMAT FADHILAH**
2. Nomor Induk Mahasiswa : **11727102158**
3. Alamat : **JL. BUDI DAYA GG. BUDI MANUNGAL NO. 85 RT/RW 006/018 KEL. TUAH KARYA KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU**
4. Kebangsaan : **INDONESIA**

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PSL 34A PP NO99 TH 2012 TTG SYARAT&TATA CARA PELAKSANAAN HAK WRG BINAAN PEMASYARAKATAN DLM PEMBERIAN REMISI THD BEBAN NEGARA DLM PENYELENGGARAAN MAKANAN BG WRG BINAAN DIRUTAN KLS II B RGT**
2. Lokasi Penelitian : **RUTAN KELAS II B RENGAT**
3. Lama Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
4. Status Peneliti : **MAHASISWA**
5. Nama Lembaga : **UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 08 April 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,



AHMAD FAHMI, S.Sos

Pembina (IV/a)

NIP. 19720311 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
2. UIN SUSKA RIAU;
3. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH RIAU

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB RENGAT

Jalan Raya Pekan Heran Km. 04 Pematang Reba, Rengat 29351

Telepon (0769) 341056, E-mail: rutan.rengat@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

• Nomor : W4.PAS.12.UM.01.10-670

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REFIN TUA SIMANULLANG, S.H.
NIP : 19810814 200703 1 002
Pangkat/ Gol : Penata / (III/c)
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RAHMAT FADHILAH
NIM : 11727102158
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"Efektivitas pasal 34 A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pemberian Remisi terhadap beban negara dalam penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Rengat sebagai Sistem Pemasyarakatan di Indonesia"**, dan telah membahas materi penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana perlunya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Rengat, 28 April 2021
KEPALA,

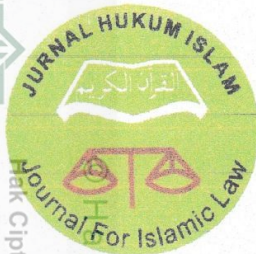
REFIN TUA SIMANULLANG
NIP. 19810814 200703 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RAHMAT FADHILAH
NIM : 11727102158
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : EFEKTIVITAS PASAL 34 A PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 99 TAHUN 2012 DALAM PEMBERIAN REMISI
 TERHADAP BEBAN NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN
 MAKANAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI
 RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B RENGAT

Pembimbing: Basir, S.H.I., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Rahmat Fadhilah lahir tanggal 30 Mei 1999 di Rengat. Penulis merupakan anak Ke-Empat dari 4 bersaudara pasangan Bapak Marlis dan Ibu Welnita. Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar Negeri 041 Pekanbaru pada tahun 2005 sampai 2011, setelah itu melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Pekanbaru pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Sultan syaruf kasim riau, fakultas syariah dan hukum mengambil jurusan Ilmu Hukum. Pada saat studi, penulis melakukan kegiatan magang di Kantor Pengadilan Negeri Kelas IIA Pekanbaru Riau pada tahun 2019, kemudian penulis lulus Dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021 dengan menyandang gelas Sarjana Hukum (SH).